



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Kades Geramat Dideadline 60 Hari**

**Kembalikan Kerugian DD Rp 319 Juta**

**BINTUHAN, BE** - Audit dana desa (DD) Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur yang dilakukan oleh Inspektorat Kaur dan BPKP menemukan kerugian negara (KN) sebesar Rp 319 juta. Dimana saat ini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sudah ditandatangani oleh Irda Kaur dan LHP itu sendiri sudah diserahkan kepada bupati dan sudah ditembuskan ke penyidik di Polres Kaur. Artinya pihak terkait termasuk mantan Kades Geramat, Edi Sarsan Adnan diberikan deadline selama 60 hari untuk mengembalikan KN sebesar Rp 319 juta.

"Salinan LHP-nya barusan kita terima, pihak terkait mendapatkan kesempatan hingga 60 hari kedepan setelah LHP terbit untuk mengembalikan KN yang terjadi," kata Kapolres Kaur, AKBP Arief Hidayat SIK melalui Kasat Reskrim IPTU Ahmad Khariuman SE MSi, kemarin (9/1).

Dikatakan Kasat, waktu

selama 60 hari itu diminta agar pihak yang melakukan kegiatan DD tahun 2018 di Desa Geramat untuk dapat mengembalikan kerugian negara yang terjadi. Dimana uang tersebut wajib disetor ke kas desa serta menyerahkan bukti setor ke Inspektorat dan di tembuskan ke penyidik. Nah bila sampai waktu yang ditetapkan tak juga melakukan pengembalian kerugian negara, maka akan menjalani nasib yang sama dengan Desa Way Hawang Kecamatan Maje yang saat ini masih dalam tahap penyidikan dan dalam waktu dekat akan ada tersangka yang ditetapkan.

"Kalau mereka mengembalikan kerugian negara maka proses hukum tidak dilakukan, karena ini hasil pemeriksaan Inspektorat," terang Kasat.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Daerah Kaur, Three Marnofe MTPd ketika dikonfirmasi membenarkan sudah ditandatanganinya LHP Gemarat, sehingga pihak terkait yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dalam hal ini Kades setempat serta Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ditunggu itikad baiknya

mengembalikan kerugian negara hingga 60 hari ke depan atau selama 2 bulan.

"Ya tadi (9/1) LHP sudah saya tanda tangani dan sudah kita tembuskan ke penyidik juga, kita tunggu 60 hari kedepan untuk pngembaliannya," terangnya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya tim sudah melakukan pengecekan pada belanja barang dan jasa di kegiatan fisik DD desa itu yang nilainya kisaran Rp 400 jutaan lebih. Dimana ada beberapa item yang tidak dikerjakan ada juga dugaan indikasi pengurangan volume seperti pengerukan talud dan penataan badan jalan menggunakan alat berat.

Selain itu, ada juga pekerjaan yang tak diselesaikan. Hasil pengecekan di lapangan ternyata memang DD yang nominalnya Rp 803 juta itu hanya 60 persen dicairkan atau hanya sekitar Rp 400 jutaan saja. Sedangkan sisanya tak lagi diberikan rekomendasi oleh DPMD Kaur. Namun rupanya dari Rp 400 jutaan itu malah tak dikerjakan secara keseluruhan oleh pelaksana sehingga ditemukan kerugian negara cukup besar. **(618)**